



Laporan Kinerja Tahunan Triwulan I Tahun 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BADAN MUTU KKP KALIMANTAN TENGAH

SUMMARY

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 5 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta review dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya keselarasan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Akuntabilitas kinerja disusun berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi yang dalam road map tersebut mengamanatkan 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) birokrasi yang efektif dan efisien; serta (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan atas penggunaan anggaran dengan indikator adanya pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan good government dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik.

Sebagai instansi pemerintah, Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan operasional dan administrasi. Laporan ini memberi gambaran menyeluruh kegiatan operasional dan administrasi yang telah dilaksanakan selama Triwulan I Tahun 2025 baik keberhasilan maupun kendala yang dihadapi.

Selama Triwulan I Tahun 2025, Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah telah merumuskan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaannya Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah telah berusaha melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian kinerja selama Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian Kinerja Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70
		2	Persentase Hasil Kelautan dan perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	99
SK. 2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	75
		5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	75
SK. 3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	92
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	71,5
		8	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	100
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Indeks)	87

		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	86
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	85
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	76
		13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70
		14	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	88

Secara keseluruhan, capaian kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya mencapai lebih dari 100%. Hal ini dapat dilihat dari seluruh sasaran kegiatan yang telah terealisasi sepenuhnya meliputi 13 indikator kinerja.

Untuk indikator kinerja pengendalian mutu telah tercapai sebesar 120% sampai pada Desember 2024. Indikator kinerja Standardisasi Sistem dan Kepatuhan telah tercapai sebesar 118,71 % dan Indikator Kinerja Tatakelola Pemerintahan yang baik lingkup BKIP, seluruhnya telah tercapai sebesar 108,12%.

Beberapa kendala dan permasalahan pasti menjadi tantangan selama Triwulan I Tahun 2025, namun dengan semangat dan kerjasama yang baik, sehingga seluruh kegiatan tetap dapat terlaksana sesuai target yang diharapkan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025 kami susun, dengan harapan semoga laporan ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah di tahun-tahun berikutnya untuk menjadi lebih baik lagi, serta memberikan banyak manfaat bagi seluruh pembacanya. Semoga keberadaan Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah banyak memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dunia.

KATA PENGANTAR

BPPMHKP Kalimantan Tengah yang merupakan satu-satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah terus menjalankan tupoksinya dalam melayani masyarakat. Hal ini sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan demi memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Adapun kegiatan yang telah dilakukan tersebut, dapat dilihat melalui laporan kinerja.

Laporan Kinerja Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah Triwulan 1 Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Kami menyadari bahwa di dalam LKj ini sangat mungkin terdapat kekurangan dan kekeliruan, olehnya masukan dan saran yang membangun kami harapkan untuk penyempurnaan LKj ini di masa mendatang.

Tak lupa Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, Semoga LKj Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Palangka Raya, 05 April 2025

Kepala



Miharjo, S.St.Pi, M.M.

DAFTAR ISI

	Halaman
SUMMARY	1
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Tujuan	10
1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	11
1.4. Arah Kebijakan dan Isu Strategis	12
1.5. Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1. Visi dan Misi.....	16
2.2. Tujuan.....	17
2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	18
2.4. Pengukuran Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Capaian Kinerja	26
3.2. Analisis dan Evaluasi	29
3.3. Realisasi Anggaran	42
BAB IV PENUTUP	44
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian KinerjaBadan Mutu KKP Kalimantan Tengah tahun 2025	2
Tabel 2. Indikator dan Target kinerjaBadan Mutu KKP Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2025	21
Tabel 3. Rekapitulasi capaian kinerjaBadan Mutu KKP Kalimantan Tengah pada tahun 2023, 2024 dan Triwulan I Tahun 2025..	27
Tabel 4. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%) oleh Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah.....	30
Tabel 5. Persentase Hasil Kelautan dan perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%) oleh Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah.....	34
Tabel 6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%) oleh Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah.....	38
Tabel 7. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)....	39
Tabel 8. Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya.....	41
Tabel 9. Jenis belanja DIPA di UPTBadan Mutu KKP Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025 (Per 31 Desember 2024).....	43
Tabel 10. Penyerapan anggaran berdasarkan kegiatan pada Triwulan I tahun 2025	43
Tabel 11. Rekomendasi dan Hasil tindak lanjut rekomendasi terhadap IKK oleh Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah selama Triwulan I tahun 2025.....	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kegiatan terkait pengawasan mutu hasil kealutan dan Perikanan di UPTBadan Mutu KKP Kalimantan Tengah	19
Gambar 2. Peta Strategi BPPMHKP Triwulan I Tahun 2025.....	19
Gambar 3. Kegiatan pengujian dan pemeriksaan di laboratoriumBadan Mutu KKP Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2025	21
Gambar 4. Kegiatan penilaian/verifikasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) oleh tim verifikasi Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah di Farm pelaku usaha perikanan di Kota Palangka Raya.....	24
Gambar 5. Dashboard Capaian IKU pada SAPK.....	26
Gambar 6. Nilai SKM Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah selama Triwulan I tahun 2025.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 5 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reuiu dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya keselarasan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Akuntabilitas kinerja disusun berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi yang dalam road map tersebut mengamanatkan 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) birokrasi yang efektif dan efisien; serta (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan good government dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik.

Sebagai instansi pemerintah, Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan operasional dan administrasi. Laporan ini memberi gambaran menyeluruh kegiatan operasional dan administrasi yang telah dilaksanakan selama Triwulan I Tahun 2025 baik keberhasilan maupun kendala yang dihadapi.

Selama Triwulan I Tahun 2025, Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah telah merumuskan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaannya Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah telah berusaha melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian kinerja selama Triwulan I Tahun 2025.

Dalam rangka melaksanakan tanggungjawabnya, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sistem tersebut merupakan suatu system yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam rangka memberikan jaminan terhadap produk hasil perikanan yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian agar dapat memenuhi persyaratan kesehatan ikan dan aman untuk dikonsumsi manusia.

Pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan diwujudkan dalam menjaga mutu hasil pengolahan produk kelautan dan perikanan serta menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Arah pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan adalah untuk meningkatkan system pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan yang mampu menjawab setiap tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap produk perikanan yang berkualitas dan pelayanan yang prima sehingga diharapkan memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Good Governemance sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 29/2014 tentang system akuntabilitas kerja instansi pemerintah serta PER MEN PAN NO. 53 /2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan Kinerja dan tata cara riview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu disusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

1.2. Tujuan

Laporan KinerjaBadan Mutu KKP Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2025 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsiBadan Mutu KKP Kalimantan Tengah selama Triwulan I Tahun 2025 dan sebagai bahan informasi internal serta pihak terkait atas kinerjaBadan Mutu KKP Kalimantan Tengah untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kinerja dimasa mendatang.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

BPPMHKP Kalimantan Tengah merupakan UPT Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan peraturan MEN-KP No. 08 tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sertifikat di tahap Produksi Primer budidaya ; CPIB (pembenihan), CBIB (pembesaran), CPPIB (pakan), CPOIB (obat ikan), CDOIB (distribusi obat ikan) ;
2. Sertifikat di tahap Produksi Primer tangkap ; CPIB (kapal pendinginan), CPIB based on HACCP kapal pembeku, monitoring pembongkaran ikan
3. Sertifikat di tahap Pasca Panen ; SKP di UMKM dan UPI, HACCP di UPI dan supplier, Cara Distribusi Ikan yang Baik
4. Sertifikasi mutu dan keamanan produk (Health Certificate / HC)
5. Pengendalian ketelusuran (traceability) mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
6. Pengendalian importasi produk kelautan dan perikanan konsumsi
7. Pengelolaan manajemen mutu laboratorium (penguji dan acuan) dan jejaring laboratorium
8. Harmonisasi SJMKHKP ; Kerjasama (nasional dan internasional), registrasi ke negara mitra, penanganan kasus mutu dan keamanan hasil Kelautan dan Perikanan
9. Monitoring ; kesegaran, perairan (marine biotoxine, logam berat, dll), mutu dan keamanan hasil Kelautan dan Perikanan di pasar domestik.

BPPMHKP Kalimantan Tengah sebagai sebuah organisasi dipimpin oleh seorang Kepala. Secara umum struktur organisasi Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah terdiri dari :

- a. Kepala Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah
- b. Kepala Urusan Umum
- c. Kelompok jabatan fungsional

Secara ringkas Struktur Organisasi sebagai mana tercantum pada gambar 1.

Gambar 2. Struktur organisasi dan Tata Kerja Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah (Sesuai Permen KP No. 92/2020)

Uraian tugas dari masing – masing bagian organisasi Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah antara lain :

- a. Sub Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga ;
- b. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan

1.4. Arah Kebijakan dan Isu Strategis

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan

memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.

2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun ntar area di dalam wilayah NKRI
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan joint inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

6. Strategi yang dilaksanakan dalam dan metode pengujian, serta informasi publik.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data.
9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKjBadan Mutu KKP Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- b. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- c. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- d. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan hal-hal lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang keseluruhannya terdapat dalam perencanaan kinerja.

Dalam perencanaan kinerja harus memperhatikan beberapa aspek diantaranya visi dan misi, tujuan, sasaran serta indikator dan target kinerja dengan uraian sebagai berikut :

2.1. Visi dan Misi

Aspek yang berkaitan dengan visi KKP sesuai dengan mandat yang diberikan kepada BPPMHKP adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah sebagai UPT BPPMHKP, menetapkan visi mengacu kepada visi BPPMHKP dalam kegiatan pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan Triwulan I Tahun 2025, yaitu “ Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Sehat Bermutu, Aman terpercaya “

Sebagai penjabaran dalam mewujudkan visi tersebut Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan

2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Jenis Agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit ikan.

2.2. Tujuan

Tujuan pembangunan BPPMHKP merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah perlu mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara nasional. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas KKP adalah melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional khususnya di wilayah tugas Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah dengan sasaran :

1. Meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah pengeluaran/ pemasukan ekspor, impor dan antar area
2. Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area
3. Menurunnya jumlah kasus penolakan / penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra
4. Meningkatnya Unit pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor
5. Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasive melalui kajian dan analisa resiko

2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana stratejik.



Persiapan alat dan bahan laboratorium untuk pemeriksaan sampel



Sampel ikan asin yang siap diujikan di Laboratorium oleh tim analis lab.



Pemeriksaan sampel di laboratorium organoleptik BPPMHKP Kalimantan Tengah oleh tim Analisis

Gambar 1. Kegiatan terkait pengawasan mutu hasil kealutan dan Perikanan di UPTBadan Mutu KKP Kalimantan Tengah

Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Berdasarkan karakteristik tersebut di atas, Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah telah melakukan menetapkan Sasaran Strategis dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang diselaraskan dengan Sasaran Strategis KKP secara nasional sebagaimana tercantum pada daftar berikut :



Gambar 2. Peta Strategi BPPMHKP Triwulan I Tahun 2025

Peta strategis BPPMHKP tersebut selanjutnya diturunkan, dengan proses yang disebut *cascading*, dari eselon III ke eselon IV hingga ke seluruh pegawai Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah. Dengan proses *cascading* tersebut maka strategi organisasi didukung oleh seluruh unit dan pegawai Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah dalam setiap level. Hal ini merupakan keunggulan lain dari penerapan pengelolaan kinerja berbasis BSC. Wujud nyata dari hasil pengelolaan kinerja dapat dirasakan dengan tercapainya sebagian besar target kinerja Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah secara keseluruhan pada Tahun 2025.

Dengan terus memelihara semangat perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) maka diharapkan terus ada pembenahan pengelolaan kinerja Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan agar visi dan misi Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat tercapai.

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.



Kegiatan di Laboratorium parasit



Kegiatan di Laboratorium bakteri



Kegiatan di Laboratorium virus



Kegiatan di Laboratorium jamur

Gambar 3. Kegiatan pengujian dan pemeriksaan di laboratorium Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2025.

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Sasaran strategis dan indikator kinerja Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ;

Tabel 2. Indikator dan Target kinerja Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70

		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70
SK. 2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	99
		4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	75
SK. 3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	75
		6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	76

		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70
		14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	88

BPPMHKP Kalimantan Tengah telah menyusun perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah. Dalam perjanjian kinerja ini terdapat 3 Sasaran Strategis, yang pencapaian realisasinya diukur dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Perjanjian kinerja BPPMHKP tersebut sesuai dengan **Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2024** tentang Indikator Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari sasaran-sasaran strategis di mana setiap SS menjadi basis dalam penentuan IKU.





Gambar 4. Kegiatan penilaian/verifikasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) oleh tim verifikasi Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah di Farm pelaku usaha perikanan di Kota Palangka Raya .

2.4. Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - a. Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi}/\text{Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi Minimize

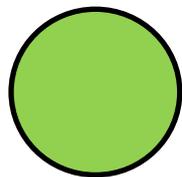
Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1-\text{Realisasi}/\text{Target}))\} \times 100\%$$

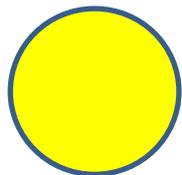
c. Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

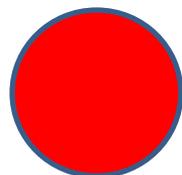
4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :



$100 \leq X \leq 120$
(memenuhi ekspektasi)



$80 \leq X \leq 100$
(belum memenuhi ekspektasi)



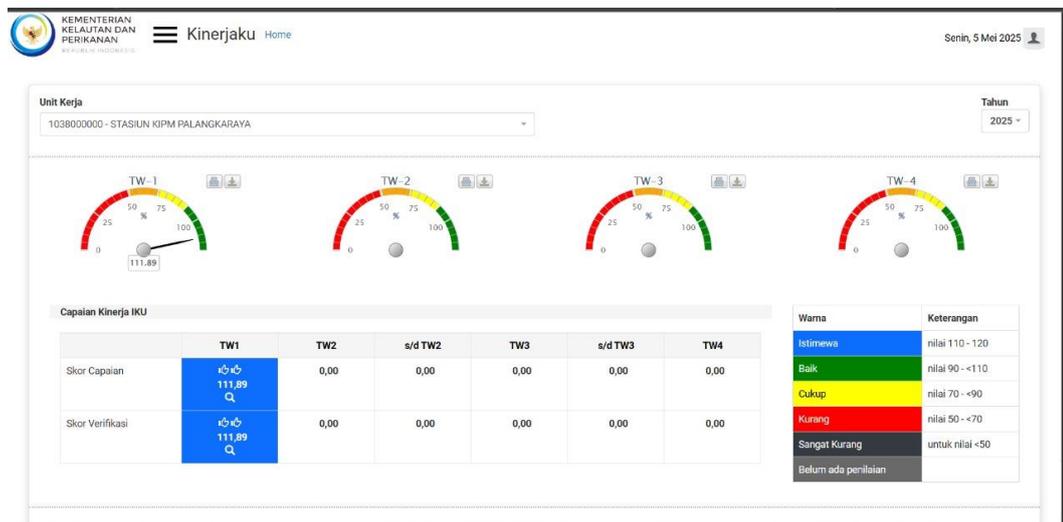
$X \leq 100$
(tidak memenuhi ekspektasi)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Capaian kinerja Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2025 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 107,75 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Gambar 5. Dashboard Capaian IKU pada SAPK

IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas

dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Langkah berikutnya dalam pencapaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator dan analisis hasil capaian indikator. Pengukuran pencapaian indikator kinerja layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Berikut hasil rekapitulasi capaian kinerja Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah pada Tahun 2022, 2025 dan Triwulan I Tahun 2025 seperti terurai pada tabel berikut :

Tabel 3. Rekapitulasi capaian kinerja Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah pada tahun 2023, 2024 dan Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGE T 2025	REALISASI (%)		
					2023	2024	Tr. I 2025
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70	-	120	120
		2	Persentase Hasil Kelautan dan perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun	70	-	120	100

			KIPM Palangka Raya (%)				
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	99	-	-	-
SK. 2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	75	-	-	-
		5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	75	-	-	-
SK. 3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	86	94,53	104,85	-
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	85	94,87	120	117,65
		8	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	76	100	100	120
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Indeks)	70	86,61	100,83	-
		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	88	-	100,98	103,69

		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	92	100	120	100
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	71,5	78,26	105,43	100
		13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	100	-	-	-
		14	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	87	89,56	111,9	91,25

3.2. Analisa dan Evaluasi

Capaian kinerja Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah pada kegiatan penjaminan mutu produk perikanan berasal dari satu sasaran strategis, yaitu Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan .

Sasaran Strategis 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BPPMHKP. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan adalah meningkatnya persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya dari tahun ke tahun. Adapun capainnya

kinerja tersebut baru terlaksana sejak adanya pemisahan lembaga dari Karantina Ikan diambil alih oleh Badan Karantina Indonesia.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1

IK 1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)

Kontribusi Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah dalam memenuhi Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan lingkup UPT KIPM Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%) oleh Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	Realisasi	% CAPAIAN
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70%	100%	120%

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur

berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

BPPMHKP Palangka Raya saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

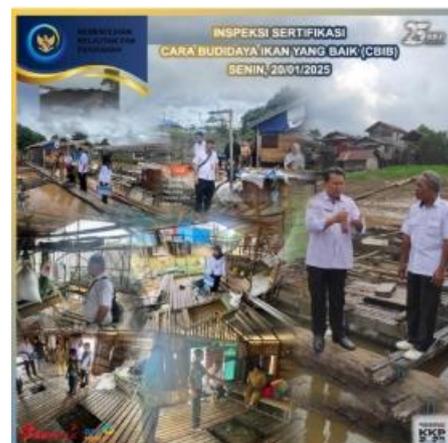
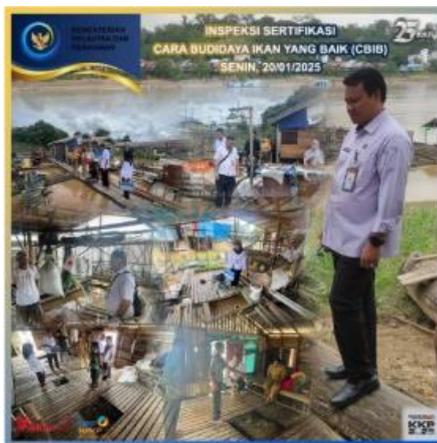
Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

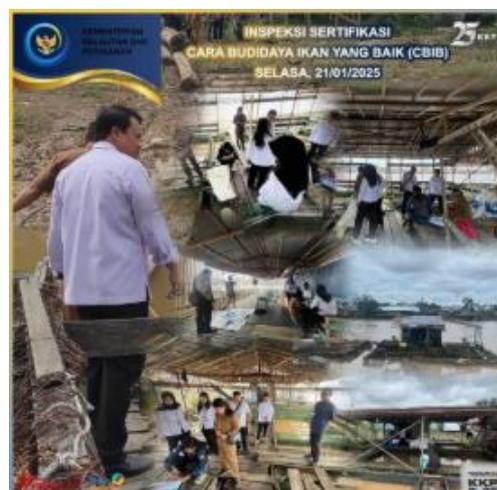
- c. Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB);
- d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
- e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
- f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Adapun berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan di Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Inspeksi Sertifikasi CBIB yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2025 di keramba Arifilah, Juanda, Supi dan Syamsul Arifin



2. Inspeksi Sertifikasi CBIB yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2025 di keramba Ardani, Jahran dan Sarlani.



- Inspeksi Sertifikasi CBIB yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 di keramba Cacah.



- Inspeksi Sertifikasi CBIB yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025 di Kolam Siti Aminah.



- Coffee Morning dan penyerahan sertifikat CBIB di BPPMHKP Palangka Raya pada tanggal 27 Februari 2025.



6. Kuliah Umum CBIB bersama Mahasiswa Universitas Kristen Palangka Raya di BPPMHKP Palangka Raya pada tanggal 4 Maret 2025.



Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2

IK 2. Persentase Hasil Kelautan dan perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)

Kontribusi Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah dalam memenuhi Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan lingkup UPT KIPM Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Persentase Hasil Kelautan dan perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%) oleh Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	Realisasi	% CAPAIAN
SK 1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan	2	Persentase Hasil Kelautan dan perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70%	70%	100%

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diberikan kepada Pelaku Usaha industry pengolahan ikan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap unit pengolahan ikan yang diterbitkan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius)
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Adapun berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan di Sektor Produksi Pasca panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Coffe Morning, sosialisasi SKP dan penyerahan sertifikat SKP di BPPMHKP Palangka Raya pada tanggal 27 Februari 2025 yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 kepada 3 UPI yaitu

#	Nama UPI	Produk ID	Produk EN	No. Seri	No. SKP	Tgl Terbit	Rank	Alamat
1	TAMPUNG PAREI	Abon Ikan	Shredded Fish	37160	35092/62/ SKP/ILN/ XII/2024	31-12-2024	B	Jl. Tingang VII B No.02, 1 Palangka, Kec. Jekan Ra Palangka Raya Kalimantan Tengah
2	TAMPUNG PAREI	Amplang Ikan	Fish Amplang	37133	35065/62/ SKP/ILN/ XII/2024	30-12-2024	B	Jl. Tingang VII B No.02, 1 Palangka, Kec. Jekan Ra Palangka Raya Kalimantan Tengah
3	TAMPUNG PAREI	Ikan Renyah	Crispy Fish	37132	35064/62/ SKP/ILN/ XII/2024	30-12-2024	B	Jl. Tingang VII B No.02, 1 Palangka, Kec. Jekan Ra Palangka Raya Kalimantan Tengah
4	PD. JAYA SAKTI	Udang Beku	Frozen Shrimp	36787	34719/62/ SKP/BK/ XII/2024	10-12-2024	A	Jl. Pasir Putih RT 10, Kel. Kapitan, Kec. Kumai, Kal Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah
5	KERUPUK MAMA ELSA	Kerupuk Ikan & Udang	Fish & Shrimp Crackers	36664	34596/62/ SKP/ILN/ XI/2024	28-11-2024	B	JL. AIS Nasution, Kel. Ku Pembuang Dua, Kec. Ser. Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah
6	KERUPUK MAMA ELSA	Bumbu Berbahan Terasi Udang	Seasoning Made From Shrimp Paste	36663	34595/62/ SKP/ILN/ XI/2024	28-11-2024	B	JL. AIS Nasution, Kel. Ku Pembuang Dua, Kec. Ser. Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah



2. Telah diterima permohonan rekomendasi dari Dinas Perikanan Kota Palangka Raya sebanyak 1 UPI dengan 10 ruang lingkup SKP, telah dilakukan verifikasi terhadap rekomendasi dan dilakukan perbaikan oleh UPI tersebut dan siap untuk dilakukan supervisi / verifikasi lapangan tanggal 25 Februari 2025.

#	Nama Upi	Provinsi	Tanggal Upload Rekomendasi	File Rekomendasi	Nama Produk	Jenis Pengajuan	Info Revisi	File Perbaikan
1	PRAMESTI MALIMA ENERGI FOKUS SEJAHTERA (PMEFS)	Kalimantan Tengah	25-02-2025		Dendeng Ikan	baru	Revisi Revisi untuk: Dinas & UPI Pesan: Dokumen sudah lengkap dan sesuai bl (konfirmasi verifikasi lapangan)	File Perbaikan Lihat Perbaikan
2	PRAMESTI MALIMA ENERGI FOKUS SEJAHTERA (PMEFS)	Kalimantan Tengah	25-02-2025		Produk Perikanan Bersifat Tambak Bekas	baru	Revisi Revisi untuk: Dinas & UPI Pesan: Dokumen sudah lengkap dan sesuai bl (konfirmasi verifikasi lapangan)	File Perbaikan Lihat Perbaikan
3	PRAMESTI MALIMA ENERGI FOKUS SEJAHTERA (PMEFS)	Kalimantan Tengah	25-02-2025		Sambal Ikan	baru	Revisi Revisi untuk: Dinas & UPI Pesan: Dokumen sudah lengkap dan sesuai bl (konfirmasi verifikasi lapangan)	File Perbaikan Lihat Perbaikan
4	PRAMESTI MALIMA ENERGI FOKUS SEJAHTERA (PMEFS)	Kalimantan Tengah	25-02-2025		Bubuk Bumbu Ikan	baru	Revisi Revisi untuk: Dinas & UPI Pesan: Dokumen sudah lengkap dan sesuai bl (konfirmasi verifikasi lapangan)	File Perbaikan Lihat Perbaikan
5	PRAMESTI MALIMA ENERGI FOKUS SEJAHTERA (PMEFS)	Kalimantan Tengah	25-02-2025		Kue Ikan	baru	Revisi Revisi untuk: Dinas & UPI Pesan: Dokumen sudah lengkap dan sesuai bl (konfirmasi verifikasi lapangan)	File Perbaikan Lihat Perbaikan
6	PRAMESTI MALIMA ENERGI FOKUS SEJAHTERA (PMEFS)	Kalimantan Tengah	25-02-2025		Ikan Fermentasi	baru	Revisi Revisi untuk: Dinas & UPI Pesan: Dokumen sudah lengkap dan sesuai bl (konfirmasi verifikasi lapangan)	File Perbaikan Lihat Perbaikan
7	PRAMESTI MALIMA ENERGI FOKUS SEJAHTERA (PMEFS)	Kalimantan Tengah	25-02-2025		Kukis Ikan	baru	Revisi Revisi untuk: Dinas & UPI Pesan: Dokumen sudah lengkap dan sesuai bl (konfirmasi verifikasi lapangan)	File Perbaikan Lihat Perbaikan
8	PRAMESTI MALIMA ENERGI FOKUS SEJAHTERA (PMEFS)	Kalimantan Tengah	25-02-2025		Snack Ikan	baru	Revisi Revisi untuk: Dinas & UPI Pesan: Dokumen sudah lengkap dan sesuai bl (konfirmasi verifikasi lapangan)	File Perbaikan Lihat Perbaikan
9	PRAMESTI MALIMA ENERGI FOKUS SEJAHTERA (PMEFS)	Kalimantan Tengah	25-02-2025		Mie Ikan	baru	Revisi Revisi untuk: Dinas & UPI Pesan: SKP ruang lingkup Mie Ikan masih berlaku masa berlaku berdasarkan Nomor sertifikat : No. 32906/G2/SKP/ILN/VIII/2024 yaitu sampai tanggal 01 Agustus 2025	File Perbaikan Lihat Perbaikan
10	PRAMESTI MALIMA ENERGI FOKUS SEJAHTERA (PMEFS)	Kalimantan Tengah	08-08-2024		Kue Ikan	perpanjangan	Revisi Revisi untuk: Dinas & UPI Pesan: Dokumen sudah lengkap dan sesuai bl (konfirmasi verifikasi lapangan)	File Perbaikan Lihat Perbaikan

Dari 10 Rekomendasi tersebut di atas, 9 sudah dilakukan verifikasi lengkap untuk dokumen dan 1 dilakukan penolakan karena ruang lingkup masih berlaku. Sudah lakukan pemberitahuan kepada pihak UPI untuk dilakukan verifikasi / supervisi akan tetapi pihak UPI tidak bersedia / meminta penundaan dikarenakan tidak melakukan produksi sampai setelah hari

Raya Idul Fitri (bulan April). Sehubungan hal tersebut maka kami rekomendasikan / permohonan tersebut dapat dianggap belum memenuhi persyaratan sehingga dalam perhitungan capaian indikator kinerja permohonan / rekomendasi SKP yang memenuhi persyaratan adalah 0.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3

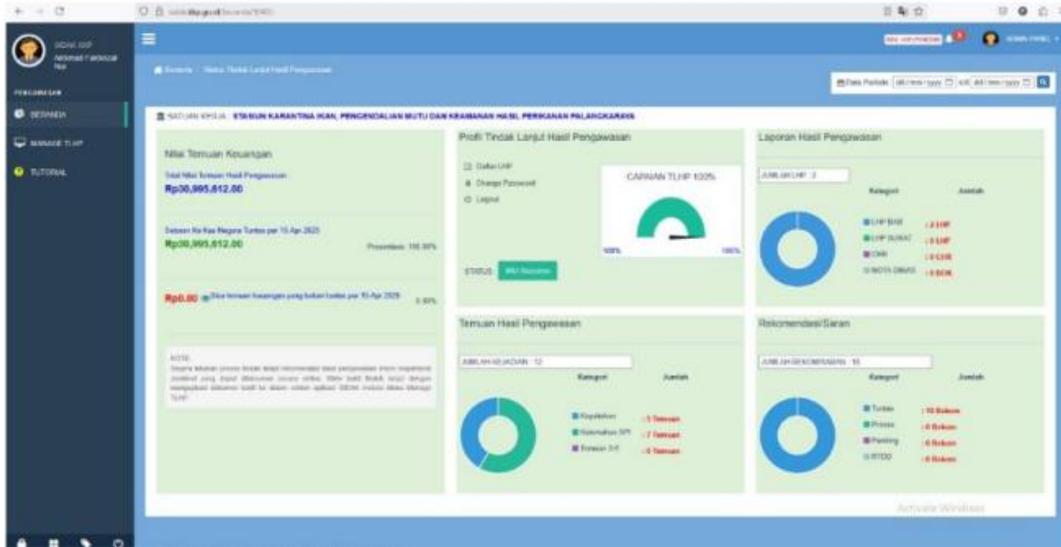
IK 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)

Kontribusi Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah dalam memenuhi Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan lingkup UPT KIPM Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%) oleh Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	Realisasi	% CAPAIAN
SK 3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	85%	100%	117,6%

Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP. Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 100% dengan target 85% dan capaiannya adalah 117,6%.



Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2

IK 12. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)

Kontribusi Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah dalam memenuhi Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan lingkup UPT KIPM Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	Realisasi	% CAPAIAN
SK 3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	76%	100%	120%

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang

dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya adalah 100% dengan target 76% dan capaiannya adalah 120%. Frekuensi perhitungan indikator ini adalah setiap triwulan.

Adapun berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Telah dilakukan penginputan SIRUP dan perbaikan SIRUP sesuai dengan kondisi terbaru sesuai kebijakan penghematan anggaran pemerintah RI pada tanggal 22 Maret 2025.
2. Telah dikirimkan surat klarifikasi dengan nomor Nomor : B.163/SKIPM.PKY/RC.420/III/2025 24 Maret 2025 tentang Penyampaian Form Klarifikasi Belanja PBJ Pasca Efisiensi kepada Sekretariat BPPMHKP yang diteruskan ke Biro Umum KKP dan LKPP.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 14

IK 14. Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya

Kontribusi Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah dalam memenuhi Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan lingkup UPT KIPM Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	Realisasi	% CAPAIAN
SK 3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	14	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	76%	100%	120%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari seluruh UPT

BPPMHKP Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai) pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 91,25 dengan target 88 dan capaiannya 103,6%. Pengukuran capaian dilakukan setiap triwulan.

Adapun berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator disertakan Foto/Dokumentasi Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya adalah sebagai berikut :



Gambar 6. Nilai SKM Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah selama Triwulan I tahun 2025

3.5. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pada tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip **penghematan** dan **efisiensi**, bahkan beberapa kegiatan tidak tersedia anggaran atau jauh dibawah standar biaya umum (SBU), namun dengan komitmen dan pengabdian seluruh pegawai, kegiatan-kegiatan tetap terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dengan rincian sebagai berikut ;

Tabel 9. Jenis belanja DIPA di UPTBadan Mutu KKP Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025 (Per 31 Desember 2024).

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	KET (%)
Belanja Pegawai	1.523.822.000,-	273.323.674,-	17,94%
Belanja Barang	1.787.385.000,-	324.279.597,-	18,14%
Belanja Modal	0,-	0,-	0,00%
TOTAL	3.311.207.000,-	597.603.271,-	18,05%

Dari kegiatan belanja Tahun 2025 di atas, pembiayaan berasal dari :

a. Anggaran Rupiah Murni	: Rp.	3.161.659.000,-
b. Anggaran PNBPN	: Rp.	149.548.000,-
JUMLAH	: Rp.	3.311.207.000,-

Selama tahun 2025, total anggaran untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sebesar **Rp. 3.311.207.000,-** (Tiga milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus tujuh ribu rupiah) dan selama Triwulan I tahun 2025 telah terealisasi sebesar **Rp 597.603.271,-** (Lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa persentase realisasi Triwulan I tahun 2025 sebesar 18,05%.

Tabel 10. Penyerapan anggaran berdasarkan kegiatan pada Triwulan I tahun 2025

No	Kode>Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup BPPMHKP	2.543.125.000,-	163.431.466,-	2.379.693.534,-	6,43
2	Manajemen Mutu	77.464.000,-	0.00	77.464.000,-	0.00
3	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	42.821.000,-	0.00	42.821.000,-	0.00
	TOTAL	2.663.410.000,-	163.431.466,-	2.499.978.534,-	6,43

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Tahun 2025, seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah telah berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Keberhasilan pelaksanaan pengembangan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui peningkatan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Berbagai hambatan dan kendala pada pelaksanaan kegiatan selama Triwulan I tahun anggaran 2025 telah diantisipasi melalui monitoring dan evaluasi setiap triwulan dalam pelaporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah. Di samping itu juga dilakukan koordinasi secara intensif dengan BPPMHKP dalam rangka percepatan penyerapan anggaran.

Laporan kinerja Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis kepada pemangku kepentingan dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuk pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, laporan ini juga dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) di lingkungan Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah pada masa datang.

Pencapaian terhadap target sasaran strategis kinerja Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan dan program di masa yang akan datang. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan analisis secara komprehensif terhadap capaian sasaran strategis yang dijabarkan dalam indikator kinerja utama Tahun 2025, dengan demikian diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, dimana hal ini merupakan salah satu fungsi pokok dan tujuan dari Laporan Kinerja Tahun 2025.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU dan IKM Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025, antara lain:

1. Masih harus selalu update Rencana Penarikan Dana yang mempengaruhi Indikator deviasi Halaman III DIPA;
2. Belum tercapainya Target IKU “UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah”.

4.1. Rekomendasi & Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah pada Triwulan I tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

Tabel 11. Rekomendasi dan Hasil tindak lanjut rekomendasi terhadap IKK oleh Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah selama Triwulan I tahun 2025.

No. IKK	Uraian IKK		
1	1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya		
	Rekomendasi	Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi	Penanggung jawab
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sosialisasi melalui zoom bersama Dinas Perikanan / Penyuluh Perikanan Kabupaten lain selain Kota Palangka Raya ✓ Pembuatan Grup WA CBIB untuk Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Kapuas ✓ Sosialisasi CPIB kepada BBI milik pemerintah yang sudah expired(habis) masa berlakunya. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sudah dilakukan inspeksi CBIB kepada pembudidaya di Kota Palangka Raya. ✓ Sudah dilaksanakan penyerahan sertifikat CBIB kepada pembudidaya di Kota Palangka Raya 	Timja Pengendalian dan Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2	2. Persentase Hasil Kelautan dan perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)		
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan verifikasi / supervisi kepada UPI PRAMESTI MALIMA ENERGI FOKUS SEJAHTERA (PMEFS) ✓ Melakukan sosialisasi dan asistensi penerbitan sertifikasi HACCP kepada UPI yang akan melakukan pengajuan sertifikat HACCP baru atau perpanjangan. 	Melaksanakan penyerahan sertifikat SKP kepada UPI yang telah terbit sertifikat SKP pada tanggal 27 Februari 2025.	Inspektur Mutu yang ditunjuk
11	3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)		
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan pemantauan nilai rekomendasi dari aplikasi SIDAK KKP dari bulan Januari sampai Maret 2025 	-	Dukungan Manajerial
12	4. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP		

	lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)		
	✓ Melakukan pemantauan SIRUP apabila dilakukan Revisi DIPA.	✓ Telah dilakukan revisi RUP pada aplikasi SIRUP.	Operator SIRUP
14	5. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)		
	✓ Melakukan penilaian tap unsur pelayanan di aplikasi SUSAN KKP	-	Pengendalian dan Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan